



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

RENSTRA

2025-2029



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Kelautan dan Perikanan untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029. Disamping itu dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Dompu. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya Anggota Tim Penyusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Dompu, Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dompu,



Amiruddin S. Hut
Pembina TK/II (IV/b)
NIP. 197111301998031009

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	54
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	63
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029	64
3.2 Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029.....	68
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	85
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	104
BAB V PENUTUP	115
5.1 Pedoman Transisi	117
5.2 Kaidah Pelaksanaan	117
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan, Pendidikan dan Diklat.....	22
Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.3 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	23
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	23
Tabel 2.6 Sumberdaya Sarana dan Prasarana	24
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Periode Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024.....	20
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Periode Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024.....	34
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Periode Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024	37
Tabel 2.10 Pendapatan Asli Daerah, Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024	47
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu 2021-2024	49
Tabel 2.12 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	53
Tabel 2.13 Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	57
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2025-2029	66
Tabel 3.2 Tahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu	71
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	73

Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	76
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subjegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029.....	87
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subjegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029.....	98
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	109
Tabel 4.4 Inidkator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 (Persentase).....	112
Tabel 4.5 Inidkator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 (Angka).....	113
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	22
Gambar 1.3 Kerangka Analisis Perumusan Tahapan Renstra	69
Gambar 1.4 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.....	23
Gambar 1.5 Keterkaitan Pengendalian Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA.....	23
Gambar 5.1 <i>Keterkaitan Pengendalian Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan dalam RPJMD, RENSTRA, dan RENJA.....</i>	120

BAB I

PENDAHULUAN



**DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025-2030 memiliki visi pembangunan adalah **“Terwujudnya Kabupaten Dompu yang Maju, Sejahtera, Religius, Berkeadilan dan Berbudaya”** dengan 4 (empat) misi pembangunan yaitu :

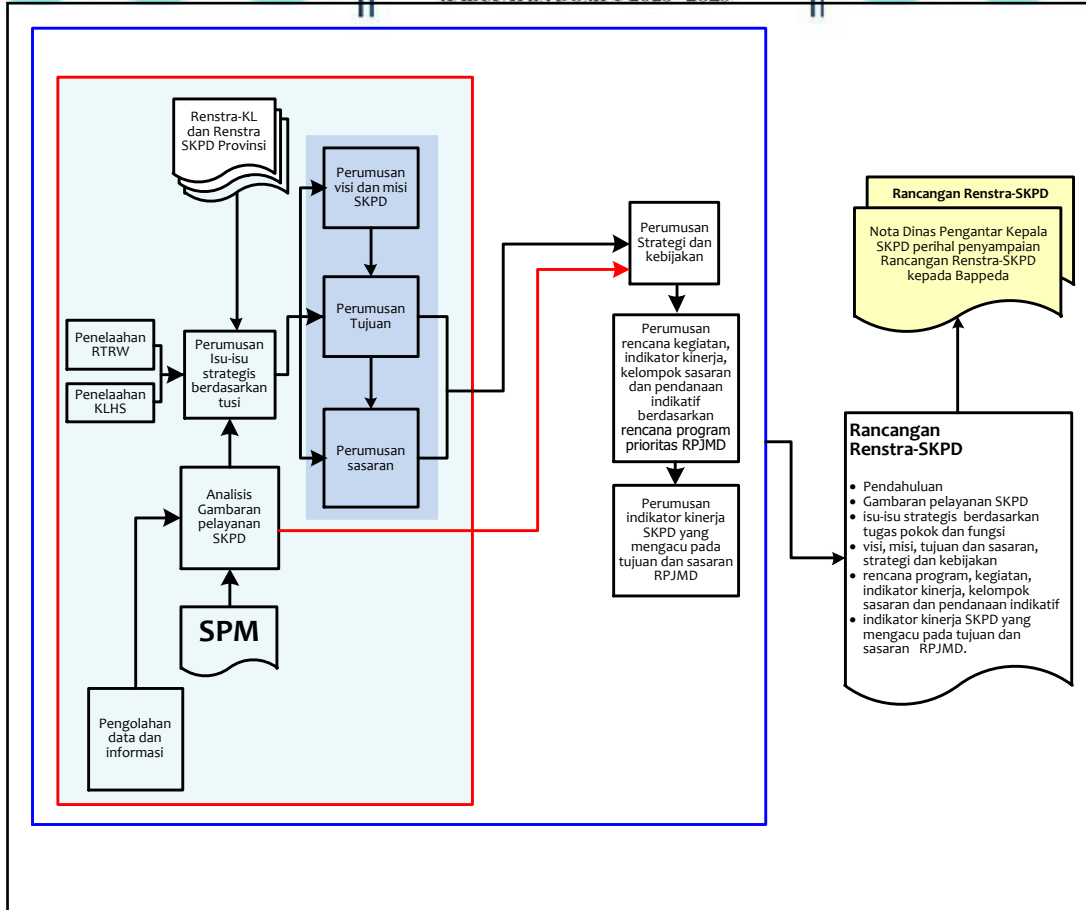
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Prima
2. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, tertib, Patuh Hukum, dan Toleran Berbasis Kearifan Lokal.
3. Menjamin Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Perlindungan Sosial yang Optimal
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dengan Memperhatikan Ketahanan Ekologi.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Dompu 2025-2030 yang dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) adanya perubahan target pencapaian pembangunan di Kabupaten Dompu dalam target pembagian peran pencapaian indikator kinerja pembangunan Nasional 2025-2029, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029; (2) adanya perubahan kewenangan pemerintah Kabupaten Dompu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan (3) adanya beberapa strategi, kebijakan dan program baru dari Bupati dan Wakil Bupati Dompu sebagai upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025-2030.

Memperhatikan beberapa pertimbangan diatas, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Dompu, paradigma

pembangunan Kelautan dan Perikanan tetap selaras mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk :

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara ;
3. Mendorong perluasan kesempatan kerja
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan ; dan
9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan dan tata ruang.



Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu yang disusun setiap Tahun selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun. Selain itu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, baik Evaluasi renstra maupun Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompus (Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Nomor 90);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dompus Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2024 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 24);
26. Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan/ subkegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu maupun visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Dompu Tahun 2025- 2029;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan/subkegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memahami, menilai arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh *stakeholder*;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus;
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara singkat apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang selaras dengan Visi dan Misi Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan pendanaan indikatif yang menjadi kewenangan SKPD, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam kurun lima tahun mendatang.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



**DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2025**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dibentuk dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya didasarkan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu pada Bab II : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

Bagian Kesatu : Kedudukan pasal 3 dinyatakan :

Dinas-Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi, Pasal 4 menyatakan :

1. Dinas-Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Dinas-Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu diatur pada Bab II Bagian Ketiga Paragraf 8 Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas kelautan dan Perikanan mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Jabatan pelaksana;
 - h. UPTD

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan sesuai Peraturan Bupati Dompus Nomor 28 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus pada Lampiran VIII.b sebagai berikut :

Kepala Dinas : Mempunyai tugas pokok yakni memimpin, melaksanakan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.

- Sekretariat Dinas : Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, pengawasan, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.
- Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian : Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan sub bagian dalam melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan ketatausahaan, dan kepegawaian
- Kepala bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang pulau, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil (PTRLP4K) : Mempunyai tugas melaksanakan melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melakukan bimbingan teknis, inventarisasi dan penerapan peraturan-peraturan dibidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
- Kepala bidang perikanan Budi Daya (PBD) : Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemeberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya.
- Kepala bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan (PDSPKP) : Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang-bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

Kepala Dinas

- Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan
- Perencanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan.
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sekretariat Dinas

- Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan
- Perencanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan.
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan
- Membagi tugas kepada sub bagian yang menjadi tanggung jawabannya
- Memberikan arahan kepada kepala bidang dan kepala UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik
- Melaksanakan koordinasi dengan kepala

bidang dan kepala UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- Menilai prestasi kepala bidang dan kepala UPT
- Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dibidang kelautan dan perikanan
- Menyusun laporan dinas kelautan dan perikanan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- Melaksanakan administrasi dalam bentuk evaluasi dan monitoring dibidang sekretariat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Melakukan urusan ketatausahaan/ surat menyurat
- Melakukan urusan kepegawaian di lingkungan dinas
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
- Memproses usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai negeri sipil
- Memproses usul diklat bagi pegawai negeri sipil
- Memproses usul pengangkatan CPNS dan

**Kepala Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian**

PNS

- Memproses cuti dan izin pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap
- Menyusun DUK PNS
- Memproses penempatan pegawai dalam lingkungan dinas kebijakan kepala dinas
- Membantu kepala dinas dalam pembinaan pegawai
- Memfasilitasi penyelesaian DP3 PNS/CPNS
- Melakukan pembinaan pegawai
- Melakukan urusan perlengkapan dan asset milik dinas
- Fasilitas pelayanan administrasi pengajuan surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas keluar daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu
- Melaksanakan urusan kerumah tangaan dan keprotokolan
- Menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sub bagian umum dan kepegawaian sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan (LAKIP) Sekretaris
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

**Kepala Bidang
Perikanan Tangkap
dan Pengelolaan**

- Perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, prosedur kerja, implementasi dan identifikasi tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat

**Ruang Laut, Pesisir
Pantai dan Pulau-
Pulau Kecil
(PTRLP4K)**

pesisir dan pengelolaan sumberdaya

- Pelaksanaan bimbingan teknis, monev, pelaporan, rehabilitasi di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil
- Melaksanakan administrasi dibidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

**Kepala Bidang
Perikanan
Budidaya (PBD)**

- Perumusan kebijakan pemetaan tata ruang komoditas, penataan alih fungsi lahan dan inventarisasi lahan perluasan areal dan pengelolaan tata guna lahan kelautan dan perikanan
- Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan lahan, pengelolaan dan tata guna lahan, sarana prasarana kelautan dan perikanan
- Menyusun rencana dan program kerja dibidang perikanan budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Bimbingan dan pengendalian terhadap

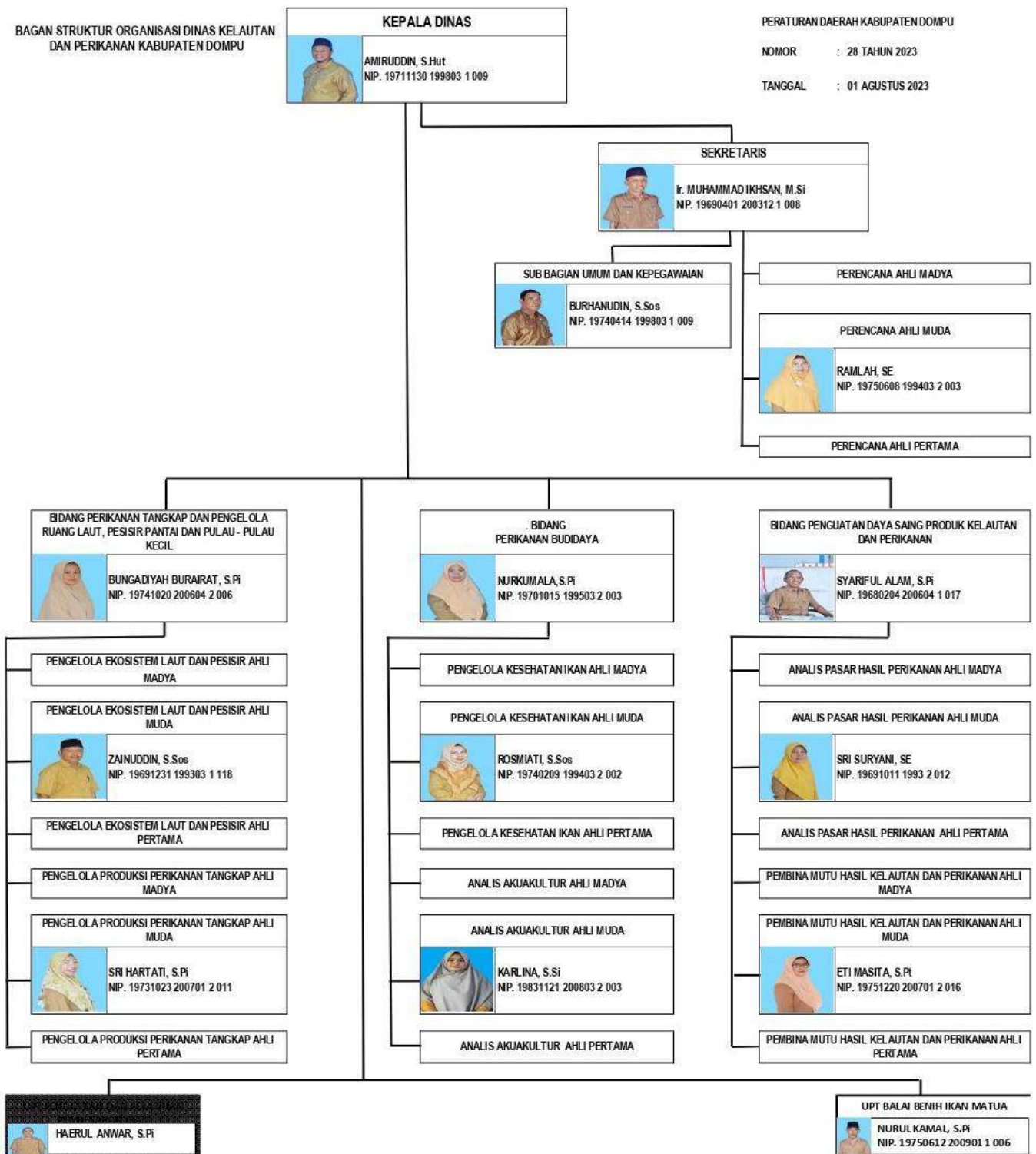
**Kepala Bidang
Penguatan Daya
Saing Produk
Kelautan Dan
Perikanan (PDSPKP)**

mutu produksi dan pemanfaatan benih ikan dan kesehatan lingkungan serta penanganan hama dan penyakit

- Melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi pengembangan lahan dan pengendalian terhadap mutu usaha budidaya dan produksi perikanan
- Melaksanakan administrasi bidang pengelolaan dan kajian-kajian usaha budidaya perikanan
- Perumusan kebijakan penguatan daya saing produk kelautan perikanan dan inventarisasi
- Melaksanakan kebijakan dibidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penanganan mutu, diversifikasi produk, sistim logistik produk kelautan dan perikanan dan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan
- Penyusunan pedoman, prosedur, kriteria sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, terhadap penguatan daya produk kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan mutu diversifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistim logistik serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan
- Melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penguatan daya saing produk

kelautan perikanan

- Menyiapkan data statistik daya saing produk
- Melaksanakan administrasi dibidang penguatan daya saing produk kelautan perikanan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Gambar 2.1 Struktur Organinsasi Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu sumber daya manusia dengan jumlah personil Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 94 orang dengan komposisi berdasarkan golongan, pendidikan dan Diklat sbb.:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan, Pendidikan dan Diklat

No	Status	Ess	Pendidikan	Jumlah	Diklat	
					Diklatpim	Jml
1	PNS Pemegang Jabatan	II	S1	1	SPAMA	1
		III	S2	1	SPAMA	1
			S1	3	SPAMA	1
		IV	S1	3		
2	PNS Fungsional		S1	7		
	PNS Staf		S1	28		
			Sarmud	3		
			SMU	15		
3	Kontrak Daerah		S1	3		
			SMU	1		
4	Kontrak Dinas		S1	13		
			SARMUD	1		
			SMU	10		
			SMP			
			SD	1		
5	Tenaga Sukarela		S1	3		
			SMU	1		
	Jumlah			94		3

Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki~Laki	Perempuan	Jumlah
34	27	61

Tabel 2.3 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki~Laki	Perempuan	Jumlah
SD	-	-	-
SMP	-	-	-
SMA	14	1	15

Tingkat Pendidikan	Laki~Laki	Perempuan	Jumlah
SARMUD		3	3
S.1	19	23	42
S.2	1	-	1
Total	36	27	61

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki~Laki	Perempuan	Jumlah
IV	3	2	5
III	23	21	44
II	8	4	12
I	-	-	-
Total	34	27	61

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki~Laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	1		1
Eselon III	2	2	4
Eselon IV	3	-	3
Fungsional	1	6	7
Pelaksana	1	6	7
Total	7	8	15

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki sumber daya sarana dan prasarana yang masih terbatas, dimana banyak sarana yang ada dalam keadaan rusak dan kurang memadai, adapun rekap sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :

Tabel 2.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Ruang							Jumlah	Ket
		Kepala Dinas/ Sekretariat	Bidang Perikanan Budidaya	Bidang Penguatan Daya Saing Produk KL	Bidang Perikanan Tangkap dan P4RIL	UPT BBI Matua	UPT Pendidikan dan Pelatihan Pembesaran Ikan	Penyuluh Perikanan		
I	KIB A								42.882.00 m2	
1	Tanah Bangunan Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	42.882.00 m2	Baik
II	KIB B	120	34	33	8	3	2	12	212	
	Kendaraan Dinas Roda 4	2	1	1	2	-	-	-	6	Baik/Rusak
2	Kendaraan Dinas Roda 2	5	4	3	4	1	1	3	21	Baik/Rusak
3	Meja Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	1	Baik
4	Meja Eselon III	1	1	1	1	-	-	-	4	Baik
5	Meja 1/2 Biro	14	12	14	14	1	1	9	65	Baik
6	Meja Rapat	9	-	-	-	-	-	-	9	Baik
7	Kursi kerja Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	1	Baik
8	Kursi Eselon III	1	1	1	1	-	-	-	4	Baik
10	Kursi Kerja	17	8	7	10	-	-	-	53	Baik
11	Kursi Tamu/Sofa	2	1	1	1	-	-	-	5	Baik
12	Kursi Rapat	33	-	-	-	-	-	-	33	Baik
15	Lemari ES	1	-	1	-	-	-	-	2	Baik

No.	Nama Barang	Ruang							Jumlah	Ket
		Kepala Dinas/ Sekretariat	Bidang Perikanan Budidaya	Bidang Penguatan Daya Saing Produk KL	Bidang Perikanan Tangkap dan P4RIL	UPT BBI Matua	UPT Pendidikan dan Pelatihan Pembesaran Ikan	Penyuluh Perikanan		
16	Estalase	1	-	-	-	-	-	-	1	Baik
17	AC	6	-	-	-	-	-	-	10	Baik
18.	Lemari Arsip	5	1	1	1	-	-	-	8	Baik
19	Televisi	1	-	-	-	-	-	-	1	Baik
20	Laptop	11	4	2	6	1	-	-	23	Baik
21	Scanner	1	-	-	-	-	-	-	1	Baik
22	Printer	4	1	1	1	-	-	-	7	Baik
23	Proyektor	2	-	-	-	-	-	-	2	Baik
24	Layar Proyektor	1	-	-	-	-	-	-	1	Baik
25	Soundsystem/Speaker	1	-	-	-	-	-	-	1	Baik
III	KIB C	3							3	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	-	-	-	-	-	1	6.073 m2
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	-	-	-	-	-	-	1	26.756 m2
4	Konstruksi Pagar	1	-	-	-	-	-	-	1	669 m
	Jumlah KIB C	123	34	33	8	3	3	21	192	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Dompus dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.3.1 Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 terdapat 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Pertama** Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus pada periode 2021-2026 yaitu **Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian indikator ini terealisasi rata-rata sebesar 100,95 persen, dihitung menggunakan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa seluruh proses perencanaan, mulai dari perumusan kebijakan, penentuan prioritas pembangunan, hingga sinkronisasi program dan kegiatan, telah dilakukan secara tepat, terukur, dan berkesinambungan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Kedua** Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus pada periode 2021-2026 yaitu **Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian indikator ini terealisasi rata-rata sebesar 108,41 persen, dihitung menggunakan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa seluruh proses perencanaan, mulai dari perumusan kebijakan, penentuan prioritas pembangunan, hingga sinkronisasi program dan kegiatan, telah dilakukan secara tepat, terukur, dan berkesinambungan antara indikator utama serta kegiatan pendukung didalamnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Ketiga** Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu pada periode 2021–2026 yaitu **Volume Produksi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan**. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian indikator ini terealisasi rata-rata sebesar 99,73 persen, dihitung menggunakan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Keempat** Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu pada periode 2021–2026 yaitu **Nilai SAKIP OPD**. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi, selama periode Renstra Tahun 2021 pencapaian nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu memiliki tren peningkatan yang signifikan dan berhasil memperoleh predikat A, melampaui target yang telah ditentukan dalam Renstra serta selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mencapai predikat nilai terbaik se-Kabupaten Dompu.

Adapun beberapa faktor pendorong pencapaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu periode 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan berupa sapsas alat tangkap ramah lingkungan
2. Penggunaan alat bantu penangkapan iakn berupa GPS dan Fish Finder oleh nelayan
3. Peningkatan jumlah armada tangkap (kapal/perahu) pennangkapan ikan
4. Sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan yang intensi kepada nelayan demi meningkatkan kapasitas nelayan itu sendiri
5. Serta kegiatan pendukung lainnya berupa rehabilitasi mangrove dan terumbu karang
6. Penanganan hama penyakit biota budidaya
7. Bantuan sapsas kepada pembudidaya

8. Adanya perluasan areal penanaman Rumput Laut dan Penambahan Kelompok Baru bagi Pembudidaya Rumput Laut.
9. Peningkatan jumlah produksi dari budidaya Air Tawar.
10. Pendampingan dan evaluasi dari Penyuluh dan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan.
11. Menerapkan BPIB yang baik dan benar.
12. Intensitas pembinaan dan pendampingan pada kelompok pengolah dan pemasar, sehingga masyarakat yang berada di wilayah pesisir banyak yang berprofesi sebagai pemasar langsung ke konsumen, dengan menggunakan roda dua, roda tiga dan roda empat.
13. Produksi Perikanan baik produksi Budidaya dan Produksi Penangkapan secara keseluruhan mengalami peningkatan.

Disamping faktor pendorong, terdapat beberapa faktor yang menghambat ataupun permasalahan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus periode 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024, antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana pengolahan untuk distribusi produk olahan belum memadai.
- 2) Terjadinya penurunan di sektor pengolahan ikan tuna, karena suplai ikan Tuna terbatas, dimana ikan Tuna didominasi oleh pengiriman segar ke luar daerah sehingga stok bahan baku untuk pengolahan di dalam daerah menjadi berkurang.
- 3) Penurunan daya beli masyarakat secara nasional berpengaruh ke permintaan produk perikanan.
- 4) Masih terbatasnya ketersediaan es batu, sebagai sarana utama pengawetan ikan.
- 5) Kurangnya sarana prasarana pendukung pemasar dalam memasarkan hasil olahan terutama sarana kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, dan sarana rantai dingin berupa coolbox.

- 6) Perubahan cuaca yang tak menentu berdampak pada kualitas dan kuantitas produk olahan serta produk pemasaran
- 7) Masih relatif rendah minat untuk keberlangsungan usaha pelaku pengolah dan pemasar.
- 8) Kemandirian usaha yang masih rendah, masih bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Secara rinci, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompur periode 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus periode 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Sat	Formula	Kondisi Awal	Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	(Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun N)	45.893,60	46.000	46.167,07	100,36	47.000,00	47.296,38	100,63	48.000	49.302,77	102,71
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun N)	9.219,47	9.323	12.263,10	131,54	10.575,00	9.909,83	93,71	11.215	11.751,70	104,79
	Volume Produksi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan	Ton	(Jumlah Produksi Produk Olahan KP Tahun N)	22.906,47	23.200	22.875,69	98,60	23.400,00	23.634,00	101,00	23.600	23.544,00	99,76
2	Nilai SAKIP OPD	Point	Nilai SAKIP OPD Tahun N-1 Hasil Penilaian Inspektorat	75,00	73,38	87,27	118,93	80,72	87,51	108,41	84,76	87,51	103,24

2.1.3.2 Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada periode 2021-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu bertanggungjawab atas pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yakni indicator Jumlah produksi Perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya dengan sasaran IKK meningkatnya jumlah produksi perikanan dan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) **Pertama** Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu pada periode 2021–2026 yaitu **Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian indikator ini terealisasi rata-rata sebesar 100,95 persen, dihitung menggunakan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan sebagai bentuk dalam upaya pencapaian target produksi telah berhasil sesuai harapan, dimana dalam setiap kegiatan tersebut baik tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dirasa sudah mampu memberikan dampak pada pencapaian indikator.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) **Kedua** Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu pada periode 2021–2026 yakni **Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian indikator ini terealisasi rata-rata sebesar 108,41 persen, dihitung menggunakan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam sebuah kegiatan yang dimana didalamnya terdapat beberapa kegiatan penunjang yang saling mendukung satu sama lain sehingga mampu mencapai keberhasilan pencapaian target produksi budidaya.

Adapun beberapa faktor pendorong pencapaian target Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu periode 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan kegiatan yang ada pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Telah mengusulkan paket kegiatan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu kepada Pemerintah Pusat, Propinsi dan juga melalui pokok Pikiran anggota DPR RI, DPR Propinsi maupun DPRD Kabupaten Dompu.
3. Telah dilaksanakannya penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat perikanan tentang pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari (Mangrove, transplantasi karang, ikan, dll) dan alat tangkap ramah lingkungan serta pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan usaha dan kelembagaan. Telah menyelenggarakan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan untuk masyarakat nelayan.
4. Telah dilaksanakannya pembinaan yang intensif terhadap pembudidaya baik pembudidaya air tawar, air payau dan laut. Untuk itu mengupayakan bantuan sarana dan prasarana budidaya yang memadai.
5. Telah dilakukannya bimtek pengolahan, pemasar, dan dilaksanakan sosialisasi Forikan, Gemarikan, melakukan pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah, menjadi guru tamu dan kunjungan edukasi ke sentra kegiatan perikanan.
6. Telah dilaksanakan pembentukan kelompok selanjutnya pengukuhan kelompok dan penilaian kelas kelompok.

Disamping faktor pendorong, terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian target Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Dompu periode 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024, antara lain:

1. Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kelautan dan Perikanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.
2. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi urusan pilihan yang penting bagi negara dan daerah mengingat negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan $\frac{2}{3}$ dari seluruh luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta km², sedangkan di Kabupaten Dompu luas perairannya adalah 1.298,17 km². Sektor Kelautan dan Perikanan juga menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah terutama untuk mendukung pariwisata, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan ekonomi.

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Periode 2021-2026 Sampai dengan Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Sat	Formula	Kondisi Awal	Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Kinerja Tahun 2024		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	(Jumlah Produksi Perikanan Tangkap + Perikanan Budidaya Tahun N)	55.113,06	55.323,00	58.430,17	105,61	57.575,00	57.206,21	99,35	59.215,00	61.045,47	103,10
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	(Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun N)	45.893,60	46.000,00	46.167,07	100,36	47.000,00	47.296,38	100,63	48.000	49.302,77	102,71
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun N)	9.219,47	9.323,00	12.263,10	131,54	10.575,00	9.909,83	93,71	11.215	11.751,70	104,79

Sumber : Hasil Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025

2.1.3.3 Kinerja Penyelenggaraan Program/Kegiatan/Subkegiatan

Kinerja Penyelenggaraan Program/Kegiatan/Subkegiatan adalah ukuran keberhasilan dalam menjalankan rencana kerja pemerintah daerah atau instansi. Penyelenggaraan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus dilaksanakan secara terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sekaligus mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Setiap program disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, RKPD, serta selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi.

Melalui penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten, peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya serta peningkatan volume produksi produk KP melalui peningkatan sapsras serta SDM yang memadai, Dinas Kelautan dan Perikanan mampu memastikan bahwa seluruh sasaran strategis dapat tercapai. Selain itu, pelaksanaan subkegiatan yang efektif dengan realisasi anggaran yang optimal turut memperkuat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga mendukung terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan yang terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Selama kurun waktu Tahun 2021-2024, sebagaimana teruang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2021-2026 dan diturunkan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus setiap tahunnya, terdapat 4 (empat) program yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus, yaitu (1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; (2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; (3) Program Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan; dan (4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan keempat Program tersebut dari Tahun 2021-2024, diketahui bahwa seluruh indikator kinerja yang ditargetkan telah tercapai 100 persen bahkan melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan. Namun, pada Tahun 2021.

Adapun beberapa faktor pendorong penyelenggaraan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu periode 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital yang terintegrasi;
- 2) RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta dokumen pendukung lainnya tersusun tepat waktu dan sesuai standar;
- 3) Tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai rencana kerja tahunan;
- 4) Kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan;
- 5) Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kinerja.

Disamping faktor pendorong, terdapat beberapa faktor yang menghambat penyelenggaraan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu periode 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya efisiensi atau pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan pandemi menghambat pelaksanaan beberapa program strategis.
- 2) Belum optimalnya penganggaran yang diterima sehingga penyerapan kegiatan penunjang urusan masih terbatas
- 3) Minimnya kegiatan bimtek/pelatihan teknis terkait
- 4) Penyesuaian regulasi nasional maupun daerah yang terjadi secara cepat menyebabkan perlunya revisi perencanaan dan penganggaran;
- 5) Belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

Secara rinci, capaian penyelenggaraan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu periode 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Dompus sampai dengan Tahun 2024

Usuran/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Point	71,25	73,38	80,72	84,76	71,25	87,10	87,51	87,51	100,00	118,70	108,41	103,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP OPD	Point	B-	B-	BB	A	B-	A	A	A	B-	BB	A	A
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD</i>	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pengadministrasian keuangan OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terlaksananya ePmbayaran Gaji ASN</i>	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Pterlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Pengujian OPD</i>	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunagan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD</i>	Dokumen	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pengadministrasian umum OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Tersedianya Komponen Listrik	Jenis	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Penyediaan Bahan Logistik</i>	Tersediannya Bahan Logistik Kantor (OPD)	Bulan	10,00	12,00	12,00	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Tersediannya Bahan Bacaan OPD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu OPD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kegiatan	50,00	50,00	50,00	53,00	50,00	50,00	50,00	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD dalam Menunjang Urusan Pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Pengadaan mebel</i>	Tersedianya Mebel untuk menunjang OPD	Unit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya</i>	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersediannya Kerjasama dengan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum kantor	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Peroarangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan kendaraan Operasional	Tahun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung bangunan Kantor	Tahun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap terhadap target daerah	Persen	19,02	19,17	19,58	20,00	19,02	19,21	19,71	20,54	100,00	100,23	100,63	102,71
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu daerah Kabupaten yang tersedia	Ton	45.850,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	45.850,00	46.107,07	47.296,38	49.302,77	100,00	100,23	100,63	102,71
<i>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia</i>	Unit/Paket	500,00	1.400,00	76,00	379,00	500,00	1.400,00	76,00	397,00	100,00	100,00	100,00	104,75
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	Cakupan peningkatan	Persen	20,00	15,73	17,54	19,34	20,00	15,73	29,23	19,34	100,00	100,00	166,67	100,00

Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kabupaten/Kota	pemberdayaan masyarakat pesisir													
<i>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</i>	<i>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</i>	Orang	80,00	200,00	120,00	130,00	80,00	200,00	200,00	130,00	100,00	100,00	166,67	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan budidaya terhadap target daerah	Persen	13,00	13,69	15,28	17,26	13,00	24,43	15,89	18,08	100,00	178,44	104,00	104,76
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan	Persen	23,46	27,04	32,12	38,98	23,46	48,25	33,40	40,84	100,00	178,44	104,00	104,76
<i>Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil</i>	<i>Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas</i>		120,00	167,00	175,00	210,00	120,00	298,00	182,00	220,00	100,00	178,44	104,00	104,76
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	8.895,00	9.925,00	10.575,00	11.215,00	9.219,07	12.263,10	9.909,83	11.751,70	103,64	123,56	93,71	104,79
<i>Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten</i>	<i>Jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 daerah kabupaten</i>	Unit	150,00	20,00	105,00	43,00	150,00	39,00	149,00	43,00	100,00	195,00	141,90	100,00

Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<i>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Daerah Kabupaten</i>	<i>Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 daerah kabupaten yang teruji melalui pengelolaan lingkungan</i>	(000) Ekor	4.274,00	1.653,75	1.756,43	2.161,25	4.274,00	2.612,93	2.756,43	2.161,25	100,00	158,00	156,93	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan volume produksi olahan perikanan	Persen	3,50	4,00	4,50	5,00	3,50	3,68	4,50	4,95	100,00	92,08	100,00	99,00
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan usaha mikro dan kecil bidang perikanan yang tersertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Persen	22,73	33,33	45,45	63,64	22,73	30,69	45,45	63,00	100,00	92,08	100,00	99,00
<i>Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Satndar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Jumlah pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko</i>	Orang	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.294,00	1.240,00	1.151,00	1.260,00	1.281,06	100,00	92,08	100,00	99,00
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)	Cakupan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107,57	110,09	101,00	100,00	107,57	110,09	101,00

Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Daerah Kabupaten/ Kota														
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 daerah Kabupaten	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kabupaten	Ton	1.250,00	1.350,00	2.500,00	1.450,00	2.749,00	1.452,20	2.752,25	1.464,50	219,92	107,57	110,09	101,00
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Daerah Kabupaten	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kabupaten yang terfasilitasi	UKM	80,00	4,00	4,00	3,00	80,00	4,00	4,00	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.1.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Selama periode tahun 2021-2024, alokasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus mengalami fluktuasi yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus. Pada masa pandemi tahun 2021, Sebagian anggaran difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penyesuaian sistem kerja berbasis digital, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan public dan pembangunan daerah berupa pengadaan bantuan untuk pelaku usaha perikanan.

Pendapatan asli daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan selama periode tahun 2021-2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Berdasarkan table 2.8 di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa selama sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari **Retribusi Daerah** dan **Lain-Lain PAD yang Sah**, khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penjualan produksi usaha daerah, serta penerimaan atas tuntutan ganti kerugian. Pada tahun 2021 realisasi PAD tercatat sebesar Rp. 115.112.860,- dengan capaian sebesar 144% dari target Rp. 80.000.000,-, pada tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp. 193.516.673,- dengan capaian 126% dari target Rp. 153.000.000,-, sedangkan pada tahun 2023 realisasi lebih rendah dari target PAD yang ditetapkan yakni Rp. 191.700.000,- dengan capaian 74% dari target sebesar Rp. 260.000.000,- dan pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 226.349.418,- dengan capaian 91% dari target Rp. 250.000.000,-.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian PAD dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan salah satu sumber PAD retribusi pemakaian kekayaan daerah yakni Pabrik es, dikarenakan penjualan es balok di pabrik es menurun dikarenakan kurangnya minat beli nelayan dan pelaku usaha perikanan saat itu dikarenakan ukuran es balok tidak sesuai dengan kebutuhan yang konsumen.

Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan kontribusi yang cukup pada pendapatan asli daerah Kabupaten Dompus, dan Dinas Kelautan dan Perikanan akan terus berbenah agar kedepannya dapat memberikan kontribusi lebih akan pendapatan asli daerah.

a. Realisasi Belanja Operasi

Pada periode tahun 2021-2023, belanja operasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup stabil,

namun anggaran turun pada tahun 2024. Belanja operasi terdiri dari atas belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus. Realisasi belanja secara umum cukup tinggi dengan capaian di atas 96 persen setiap tahunnya, mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Atau secara khususnya capaian pada setiap tahunnya sebesar 96% tahun 2021, tahun 2022 sebesar 97%, 98% pada tahun 2023 serta pada tahun 2024 sebesar 98%, dari persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus tetap terjaga secara efektif dan efisien.

b. Realisasi Belanja Modal

Pada periode tahun 2021-2024, belanja modal yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus cukup fluktuatif, dimana belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.685.950.800,- dan realisasi sebesar Rp. 1.539.455.000,- dengan capaian 91%, tahun 2022 belanja modal sebesar Rp. 307.950.000,- dan realisasi Rp. 307.900.000,- dengan capaian 100%, pada tahun 2023 belanja modal sebesar Rp. 2.743.419.817,- dan realisasi Rp. 2.722.194.841,- dengan capaian 99%, pada tahun 2024 belanja modal sebesar Rp. 222.224.929,- dan realisasi sebesar Rp. 217.224.929,- dengan capaian 98%. Pada tahun 2021 dan 2023 belanja modal cukup besar dikarenakan adanya dana alokasi khusus yang mendukung pembangunan dan rehabilitasi gedung penghasil PAD, sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 belanja modal cenderung lebih rendah dikarenakan hanya untuk memenuhi belanja rehabilitasi gedung dan bangunan kantor skala kecil

dan berkala, sebagai fasilitas kerja yang mendukung peningkatan kinerja kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus.

Tabel 2.10 Pendapatan Asli Daerah, Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.000.000	153.000.000	260.000.000	250.000.000	115.112.860	193.516.673	191.700.000	250.000.000	144	126	74	100	46,20	25,28
- Retribusi Daerah	50.000.000	150.000.000	260.000.000	250.000.000	29.640.000	129.252.500	190.320.000	250.000.000	59	86	73	100	71,00	96,54
- Lain-Lain PAD yang SAH	30.000.000	3.000.000	-	-	85.472.860	64.264.173	1.380.000	-	285	2.142	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	7.207.214.823	8.547.140.835	13.162.320.206	8.098.292.878	6.836.053.150	8.317.397.672	12.944.276.190	7.950.790.844	95	97	98	98	3,96	5,16
BELANJA OPERASI	5.521.264.023	8.239.190.835	10.418.900.389	7.876.067.949	5.296.598.150	8.009.497.672	10.222.081.349	7.733.565.915	96	97	98	98	12,57	13,45
- Belanja Pegawai	2.946.225.818	2.992.993.122	3.047.933.641	3.459.365.061	2.734.110.924	2.805.636.827	2.954.442.111	3.331.646.486	93	94	97	96	5,50	6,81
- Belanja Barang dan Jasa	1.014.182.317	5.246.197.713	7.340.966.748	4.416.702.888	1.001.955.226	5.203.860.845	7.237.639.238	4.401.919.429	99	99	99	100	63,30	63,78
- Belanja Hibah	1.560.855.888	-	30.000.000	-	1.560.532.000	-	30.000.000	-	100	-	100	-	-	-
BELANJA MODAL	1.685.950.800	307.950.000	2.743.419.817	222.224.929	1.539.455.000	307.900.000	2.722.194.841	217.224.929	91	100	99	98	-49,11	-47,94
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.183.687.000	302.950.000	1.225.088.240	195.225.000	1.038.622.000	302.900.000	1.216.467.430	190.225.000	88	100	99	97	-45,16	-43,21
- Belanja Modal Sedung dan Bangunan	502.263.800	-	1.475.480.000	26.999.929	500.833.000	-	1.464.503.911	26.999.929	100	-	99	100	-62,26	-62,22
- Belanja Modal Tetap Aset	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	100	-	-	-	-
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	42.851.577	-	-	-	41.223.500	-	-	-	96	-	-	-

Pada table 2.9 dibawah ini juga diuraikan realisasi pendanaan pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2024. Selama periode Tahun 2021-2024, pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menunjukkan kinerja keuangan yang baik dengan rata-rata realisasi di atas 90 persen. Alokasi anggaran mengalami peningkatan dari Rp. 7.207.214.823,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 8.098.292.878,- pada tahun 2024, dengan nilai pertumbuhan anggaran sebesar 16,65% di tahun 2022 dan 34,30% ditahun 2023 per tahun namun turun pada tahun 2024 sebesar 62,53%. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat pembangunan daerah sektor kelautan dan perikanan. Dari sisi realisasi, serapan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan secara umum sangat baik dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 6,34 persen dan tingkat efektivitas di atas 90 persen setiap tahunnya.

Namun pada tahun 2024, anggaran yang dapat di Kelola oleh bidang teknis lebih rendah dari tahun 2023, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 7.610.697.000,- dan tambahan anggaran yang bersumber dari DBHCHT sebesar Rp. 700.000.000,-. Namun 2 (dua) sumber anggaran tersebut tidak lagi terdapat di tahun 2024, sehingga menunjukkan penurunan anggaran yang cukup signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 5.064.027.328,-

Selama periode tahun 2021-2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu melaksanakan 4 (empat) program yang terdiri dari 3 (tiga) Program teknis dan 1 (satu) Program penunjang. Keempat program tersebut mencerminkan upaya peningkatan kualitas dari pembangunan daerah sektor kelautan dan perikanan serta optimalisasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan public. Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan kinerja anggaran, secara umum menunjukkan tren yang positif.

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Dompus sampai dengan Tahun 2021-2024

Urusan/Program/Kegiatan / Subkegiatan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	(14)	(15)
Unsur Penunjang Pemerintah Sektor Perikanan	7.207.214.823	8.647.140.835	13.162.320.206	8.098.292.878	6.561.203.150	8.317.397.672	13.024.691.190	7.951.029.844	91,04	96,19	98,95	98,18	3,96	6,61
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.638.262.425	3.983.471.111	4.014.324.656	4.831.837.539	3.416.279.082	3.788.366.570	3.995.389.874	4.688.405.975	93,90	95,10	99,53	97,03	9,92	11,13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.330.100	419.137.900	244.714.550	89.754.600	67.635.000	418.865.147	244.266.000	89.719.099	90,99	99,93	99,82	99,96	6,49	9,88
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	74.330.100	419.137.900	244.714.550	89.754.600	67.635.000	418.865.147	244.266.000	89.719.099	90,99	99,93	99,82	99,96	6,49	9,88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.201.159.818	3.017.993.122	3.047.933.641	3.461.146.061	2.987.355.924	2.830.636.827	3.034.857.111	3.333.666.486	93,32	93,79	99,57	96,32	2,64	3,72
<i>Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.869.295.818	2.915.113.122	2.967.113.641	3.380.045.061	2.657.180.924	2.727.756.827	2.954.937.111	3.252.565.486	92,61	93,57	99,59	96,23	5,61	6,97
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	269.874.000	102.880.000	80.820.000	81.101.000	268.230.000	102.880.000	79.920.000	81.101.000	99,39	100,00	98,89	100,00	-33,02	-32,88
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD</i>	61.990.000	-	-	-	61.945.000	-	-	-	99,93	-	-	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.785.187	153.685.450	237.057.677	536.579.050	193.451.700	152.984.350	232.949.277	536.357.289	99,83	99,54	98,27	99,96	40,42	40,48
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	22.573.937	8.930.600	50.797.577	18.975.000	22.535.200	8.929.000	49.133.500	18.975.000	99,83	99,98	96,72	100,00	-5,62	-5,57
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	46.368.000	19.515.000	33.662.000	58.128.000	46.360.000	19.470.000	33.661.000	58.042.000	99,98	99,77	100,00	99,85	7,83	7,78
<i>Penyediaan Bahan Logistik</i>	-	25.740.000	24.947.000	112.620.000	-	25.679.000	24.663.000	112.618.000	-	99,76	98,86	100,00	63,56	63,69
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	34.197.750	17.059.850	16.291.100	16.281.050	34.194.500	17.059.550	16.290.000	16.280.550	99,99	100,00	99,99	100,00	-21,92	-21,91

Urusan/Program/Kegiatan / Subkegiatan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	(14)	(15)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	5.940.000	6.960.000	39.500.000	-	5.450.000	5.050.000	39.400.000	-	91,75	72,56	99,75	88,05	93,36
Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.948.000	8.500.000	-	-	13.944.000	8.500.000	-	-	99,97	100,00	-	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.697.500	68.000.000	104.400.000	291.075.000	76.418.000	67.896.800	104.151.777	291.041.739	99,64	99,85	99,76	99,99	55,98	56,17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	52.000.000	61.726.000	197.225.000	-	52.000.000	61.726.000	192.225.000	-	100,00	100,00	97,46	55,95	54,62
Pengadaan mebel	-	12.000.000	34.776.000	74.925.000	-	12.000.000	34.776.000	74.925.000	-	100,00	100,00	100,00	84,14	84,14
Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	-	40.000.000	26.950.000	122.300.000	-	40.000.000	26.950.000	117.300.000	-	100,00	100,00	95,91	45,14	43,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	260.492.148	295.101.888	309.642.828	-	253.803.538	294.532.205	298.988.911	-	97,43	99,81	96,56	5,93	5,61
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	-	35.249.320	56.684.060	44.400.000	-	34.227.756	56.679.293	43.469.150	-	97,10	99,99	97,90	8,00	8,29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	225.242.828	238.417.828	265.242.828	-	219.575.782	237.852.912	255.519.761	-	97,48	99,76	96,33	5,60	5,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.987.320	80.162.491	127.790.900	237.490.000	167.836.458	80.076.708	127.059.281	237.449.190	99,32	99,89	99,43	99,98	12,01	12,26
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Peroarangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	60.798.000	55.684.495	67.390.900	107.490.000	60.696.458	55.611.708	66.799.281	107.450.190	99,83	99,87	99,12	99,96	20,92	20,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.500.000	4.000.000	7.000.000		6.500.000	4.000.000	7.000.000	-	100,00	100,00	100,00	2,50	2,50
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.189.320	17.977.996	56.400.000	123.000.000	107.140.000	17.965.000	56.260.000	122.999.000	99,03	99,93	99,75	100,00	4,37	4,71
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	431.720.838	1.445.339.950	2.529.109.850	1.192.153.700	155.886.198	1.313.874.136	2.519.347.456	1.188.803.090	36,11	90,90	99,61	99,72	40,30	96,83

Urusan/Program/Kegiatan / Subkegiatan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	(14)	(15)
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	374.996.888	1.381.340.300	2.424.580.000	1.154.060.000	99.900.000	1.250.022.408	2.414.941.610	1.150.734.390	26,64	90,49	99,60	99,71	45,46	125,84
<i>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</i>	99.999.988	1.381.340.300	2.424.580.000	1.154.060.000	99.900.000	1.250.022.408	2.414.941.610	1.150.734.390	99,90	90,49	99,60	99,71	125,98	125,84
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	274.996.900			-	274.850.000			-	99,95	-	-	-	0,00	0,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.723.950	63.999.650	104.529.850	38.093.700	55.986.198	63.851.728	104.405.846	38.068.700	98,70	99,77	99,88	99,93	-12,43	-12,06
<i>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</i>	56.723.950	63.999.650	104.529.850	38.093.700	55.986.198	63.851.728	104.405.846	38.068.700	98,70	99,77	99,88	99,93	-12,43	-12,06
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.534.419.060	2.768.480.000	3.531.150.350	1.853.745.639	1.532.689.095	2.765.994.585	3.485.492.556	1.853.266.129	99,89	99,91	98,71	99,97	6,50	6,54
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	8.022.500	568.450.000	496.999.000	20.000.000	8.022.500	567.249.373	458.902.225	20.000.000	100,00	99,79	92,33	100,00	35,59	35,59
<i>Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil</i>	8.022.500	568.450.000	496.999.000	20.000.000	8.022.500	567.249.373	458.902.225	20.000.000	100,00	99,79	92,33	100,00	35,59	35,59
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.526.396.560	2.200.030.000	3.034.151.350	1.833.745.639	1.524.666.595	2.198.745.212	3.026.590.331	1.833.266.129	99,89	99,94	99,75	99,97	6,31	6,34
<i>Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten</i>	1.386.219.000	1.996.600.000	2.787.390.000	1.697.927.710	1.386.032.000	1.995.698.786	2.780.152.531	1.697.618.200	99,99	99,95	99,74	99,98	6,99	6,99
<i>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Daerah Kabupaten</i>	140.177.560	203.430.000	246.761.350	135.817.929	138.634.595	203.046.426	246.437.800	135.647.929	98,90	99,81	99,87	99,87	-1,05	-0,72
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.602.812.500	449.849.774	3.087.735.350	220.556.000	1.456.348.775	449.162.381	3.024.461.304	220.554.650	90,86	99,85	97,95	100,00	-48,37	-46,70
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	66.702.500	208.392.500	330.329.000	178.000.000	66.422.500	207.759.231	330.184.950	178.000.000	99,58	99,70	99,96	100,00	38,71	38,90

Urusan/Program/Kegiatan / Subkegiatan	Target RESNTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	(14)	(15)
<i>Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Satndar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	66.702.500	208.392.500	330.329.000	178.000.000	66.422.500	207.759.231	330.184.950	178.000.000	99,58	99,70	99,96	100,00	38,71	38,90
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.536.110.000	241.457.274	2.757.406.350	42.556.000	1.389.926.275	241.403.150	2.694.276.354	42.554.650	90,48	99,98	97,71	100,00	-69,74	-68,72
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 daerah Kabupaten	1.495.000.000	7.735.000	11.573.000	7.556.000	1.349.208.000	7.735.000	11.573.000	7.556.000	90,25	100,00	100,00	100,00	-82,84	-82,24
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Daerah Kabupaten	41.110.000	233.722.274	2.745.833.350	35.000.000	40.718.275	233.668.150	2.682.703.354	34.998.650	99,05	99,98	97,70	100,00	-5,22	-4,92

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merujuk pada individu atau kelompok tertentu yang menjadi fokus dalam penyediaan layanan, baik itu oleh pemerintah maupun organisasi lainnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kelompok sasaran layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu mencakup berbagai pihak yang berkepentingan terhadap proses penyelenggaraan bidang urusan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

No.	Kelompok Sasaran	Bentuk Layanan	Manfaat yang Diperoleh
1.	Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)	Dalam pengambilan keputusan strategis berbasis dokumen perencanaan dan hasil kajian pemabngunan daerah	Pengambilan kebijakan berbasis data dan hasil kajian
2.	Perangkat Daerah (OPD) (Dinas Kelautan dan Perikanan, Setda, Inspektorat, Kominfo, Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, PU, LH, Sosial, Dikes, BPS, BPKAD, BKD)	Koordinasi untuk mendukung tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kualitas pelayanan bidang kelautan dan perikanan
3.	Pemerintah Pusat dan Provinsi	Penyelarasan kebijakan dan integrasi program prioritas nasional dengan perencanaan daerah, pelaporan capaian pembangunan	Terjaminnya konsistensi Antara program nasional, provinsi, dan daerah serta peningkatan akuntabilitas pelaporan
4.	DPRD Kabupaten Dompu	Penyediaan data, informasi, dan analisis perencanaan	Pengambilan keputusan Berbasis data, dukungan

No.	Kelompok Sasaran	Bentuk Layanan	Manfaat yang Diperoleh
		Pembangunan sebagai bahan kebijakan dan pembahasan anggaran	dalam fungsi pengawasandan legislasi
5.	Nelayan	Penyediaan sarana dan prasarana dan pendukung penangkapan, peningkatan SDM.	Terjaminnya pemenuhan kebutuhan sapsras, dan peningkatan SDM bagi nelayan
6.	Pembudidaya	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya, peningkatan SDM.	Terjaminnya pemenuhan kebutuhan sapsras, dan peningkatan SDM bagi Pembudidaya
7.	Pengolah dan Pemasar	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, peningkatan SDM pelaku usaha perikanan	Terjaminnya pemenuhan kebutuhan sapsras, dan peningkatan SDM bagi pengolah dan pemasar

2.2 *Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah*

2.2.1 **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kelautan dan Perikanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi urusan pilihan yang penting bagi negara dan daerah mengingat negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta km², sedangkan di Kabupaten Dompus luas perairannya adalah 1.298,17 km². Sektor Kelautan dan Perikanan juga menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah terutama untuk mendukung pariwisata, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

dapun beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan, baik masalah internal maupun masalah eksternal, yaitu:

- 1) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Kelautan dan Perikanan
- 2) Penggunaan bahan serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
- 3) Masih terdapat eksploitasi hutan mangrove
- 4) Terbatasnya permodalan atas kebijakan tentang kredit murah dan lunak bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan
- 5) Pemasaran dan harga jual produk kelautan dan perikanan masih rendah
- 6) Fluktuasi harga sarana produksi Kelautan dan Perikanan
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan luas lahan budidaya dari potensi yang ada
- 8) Belum Adanya Kawasan Pengelolaan Perikanan Terpadu
- 9) Rendahnya jumlah asuransi nelayan serta pelaku usaha perikanan
- 10) Akuntabilitas keuangan dan kinerja masih tergolong rendah

2.2.2 Isu Strategis

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok pembangunan daerah sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Dompus, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan dan evaluasinya. Oleh karena itu analisis isu strategis merupakan langkah awal di dalam proses perencanaan jangka menengah kedepannya. Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus, telaahan terhadap isu KLHS yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus, serta telaahan terhadap isu lingkungan yang dinamis meliputi telaahan terhadap isu global, nasional, dan regional, maka perumusan isu-isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029 dapat dilakukan.

Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada pelayanan dan peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus untu kurun waktu 5 (lima)

tahun kedepan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor Kelautan dan Perikanan baik secara kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pembangunan Kelautan dan Perikanan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan diatas, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut.

Tabel 2.13 Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan OPD	Isu Lingkungan yang Relevan dengan OPD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Tersedianya sumber daya alam, SDM aparatur, serta peluang investasi untuk mendukung perencanaan pembangunan	Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Kelautan dan Perikanan	1 Ketimpangan infrastruktur teknologi dan konektivitas digital	1 Perkembangan teknologi	1 Rendahnya kualitas sumber daya manusia	1 NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional	1 Peningkatan kapasitas SDM yang memiliki kemampuan profesionalisme teknis Kelautan dan Perikanan
			2 Demografi global	2 Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah		
				3 Demografi global		
	Penggunaan Bahan serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan	1 Tingginya tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial	1 Urbanisasi dunia	1 Rendahnya produktivitas	1 Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki berbagai potensi	2 Penerapan penggunaan bahan dan alat tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
Masih terdapat eksploitasi hutan mangrove	2 Rendahnya ketahanan sosial-lingkungan dan kesiapsiagaan bencana	2 Perubahan iklim	2 Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	2 Kualitas SDM yang rendah juga disebabkan oleh tingginya prevalensi stunting dibandingkan nasional	3 Penguatan perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan	
				3 Krisis lingkungan	3 TPT seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan OPD	Isu Lingkungan yang Relevan dengan OPD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
					pendidikan dasar	
					4 Kesejahteraan Bali lebih baik dibandingkan Wilayah Nusa Tenggara yang angka kemiskinannya masih tinggi	
					5 Kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap	
					6 Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada kabupaten/kota tertentu	
					7 Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan OPD	Isu Lingkungan yang Relevan dengan OPD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Terbatasnya permodalan atas kebijakan tentang kredit murah dan lunak bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 Pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya saing industri	1 Tata kelola keuangan global	1 Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	1 TPT seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar	4 Peningkatan akses permodalan dan pembiayaan murah serta lunak bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan
	Rendahnya jumlah asuransi pelaku usaha perikanan (Nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar)	2 Akses dan kualitas layanan dasar masih terbatas	2 Konstelasi perdagangan global	2 Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	2 Kesejahteraan Bali lebih baik dibandingkan Wilayah Nusa Tenggara yang angka kemiskinannya masih tinggi	
			3 Geoekonomi		3 Kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap	
					4 Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada kabupaten/kota tertentu	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan OPD	Isu Lingkungan yang Relevan dengan OPD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
					5 Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan	
					6 Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami perlambatan	
	Pemasaran dan harga jual produk kelautan dan perikanan masih rendah	1 Tingginya tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial	1 Perkembangan teknologi	1 Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	1 NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional	5 Peningkatan pemasaran dan nilai jual produk kelautan dan perikanan
	Fluktuasi harga sarana produksi Kelautan dan Perikanan	2 Pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya saing industri	2 Tata kelola keuangan global	2 Rendahnya produktivitas	2 Kualitas SDM yang rendah juga disebabkan oleh tingginya prevalensi stunting dibandingkan nasional	6 Pengendalian dan stabilisasi harga sarana produksi kelautan dan perikanan
	Belum optimalnya pemanfaatan luas lahan budidaya dari potensi yang ada	3 Akses dan kualitas layanan dasar masih terbatas	3 Konstelasi perdagangan global	3 Rendahnya kualitas sumber daya manusia	3 Kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap	7 Optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya kelautan dan perikanan sesuai

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan OPD	Isu Lingkungan yang Relevan dengan OPD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		4 Ketimpangan infrastruktur teknologi dan konektivitas digital		4 Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	4 Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada kabupaten/kota tertentu	potensi
				5 Geoekonomi	5 Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami perlambatan	
				6 Krisis lingkungan		
	Belum Adanya Kawasan Pengelolaan Perikanan Terpadu	1 Akses dan kualitas layanan dasar masih terbatas	1 Geopolitik	1 Geopolitik	1 Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki berbagai potensi ekonomi kreatif baik yang didukung oleh komoditas unggulan maupun yang dipengaruhi oleh ragam budaya dan tradisi lokal	8 Pengembangan Kawasan Pengelolaan Perikanan Terpadu
		2 Rendahnya kualitas dan capaian kesehatan masyarakat	2 Urbanisasi dunia	2 Demografi global	2 Kualitas SDM yang rendah juga disebabkan oleh tingginya prevalensi stunting dibandingkan nasional	
		3 Ketimpangan infrastruktur teknologi dan konektivitas digital	3 Demografi global	3 Rendahnya kualitas sumber daya manusia	3 Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada kabupaten/kota	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan OPD	Isu Lingkungan yang Relevan dengan OPD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
				4 Geoekonomi	4 Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan	
				5 Krisis lingkungan	5 Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami perlambatan	
	Akuntabilitas keuangan dan kinerja masih tergolong rendah	Ketimpangan infrastruktur teknologi dan konektivitas digital	Perkembangan teknologi	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki berbagai potensi ekonomi kreatif baik yang didukung oleh komoditas unggulan maupun yang dipengaruhi oleh ragam budaya dan tradisi lokal NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional	9 Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian keluaran (*outcome*) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta bentuk layanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu bertanggungjawab terhadap urusan **pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah**. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, pada periode Tahun 2025–2029, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 3 Sasaran strategis yang secara langsung diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Dompu Tahun 2025–2029 sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut secara khusus mendukung Misi ke empat Kabupaten Dompu, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dengan Memperhatikann Ketahanan Ekologi”**

Melalui urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan berkontribusi pada pencapaian Tujuan RPJMD ke enam “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan” dengan Sasaran kesembilan RPJMD, yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan. Peran ini diwujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan melalui penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, konsisten, akuntabel, serta berbasis kinerja, sehingga dapat menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan sebagai acuan dalam setiap kegiatan teknis kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Dompus.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif, serta memastikan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berkualitas, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Dompus Tahun 2025–2029. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
NSPK 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 dan 89 Tahun 2021 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 7. Peremen KP RI No. 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan Sasaran RPJMD 8. "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dengan Memperhatikann Ketahanan Ekologi"	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	61.054,47	61.408,00	62.979,12	65.197,12	67.583,11	70.162,67	72.965,25	
		Meningkatnya Persentase Pengelolaan Perikanan	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	20,55	15,99	16,16	16,48	16,80	17,12	17,45	
			Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	18,09	13,11	14,29	15,63	17,16	18,91	20,90	
		Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Volume Produksi Olahan Perikanan (%)	16,70	16,01	16,27	16,53	16,79	17,06	17,33	
			Nilai Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/KAP/Thn)	52,82	35,00	36,00	36,50	37,00	37,50	38,00	
		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Dokumen SAKIP	87,51	88,30	88,40	88,35	88,60	88,70	88,70	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun strategi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Kelautan dan Perikanan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi serta pendampingan berkelanjutan
2. Mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan melalui pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi penggantian alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan
3. Memperkuat pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove melalui konservasi, rehabilitasi, dan peningkatan peran serta masyarakat pesisir
4. Memfasilitasi akses pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan dan penguatan kelembagaan usaha
5. Mengembangkan sistem pemasaran, peningkatan kualitas produk, dan penguatan nilai tambah melalui pengolahan dan promosi produk perikanan
6. Mendorong efisiensi usaha dan pengembangan sarana produksi alternatif untuk mengurangi dampak fluktuasi harga
7. Mengembangkan dan menata kawasan budidaya perikanan berbasis potensi, daya dukung, dan keberlanjutan lingkungan
8. Mewujudkan kawasan pengelolaan perikanan terpadu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir
9. Meningkatkan jumlah asuransi nelayan serta pelaku usaha perikanan
10. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD.

Strategi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 di atas adalah rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029, dirumuskan prioritas pembangunan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu sebagaimana diuraikan pada gambar tahapan strategis berikut ini:



Gambar 3. 1 Kerangka Analisis Perumusan Tahapan Renstra

Berdasarkan kerangka analisis tahapan Renstra diatas, berikut diuraikan rencana implementasi tahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025- 2029 yang menggambarkan proses perencanaan strategis secara bertahap dan terstruktur.

Tahap I yaitu penataan dan penyelarasan dokumen perencanaan sektor kelautan dan perikanan, pemetaan potensisumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis data, penguatan sistem data dan informasi sektoral, peningkatan kapasitas SDm aparatur dan pelau usaha serta menyiapkan regulasi kelembagaan dan sistem pendukung.

Tahapan II, difokuskan pada pelaksanaan program prioritas secara intensif pada seluruh subsektor, penyediaan dan peningkatan sarana

prasarana produksi, fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan usaha, penerapan alat tangkap ramah lingkungan serta teknologi budidaya

Tahapan III, adalah pemantapan implementasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai Peningkatan kualitas dan efisiensi pelaksanaan program, integrasi program hulu–hilir kelautan dan perikanan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi

Pada **Tahapan IV**, ditekankan pada pemerataan hasil dan peningkatan dampak, perluasan jangkuan program ke seluruh wilayah dan kelmopok sasaran, pemerataan pemanfaatan lahan budidaya dan kasawasan pesisir, peningkatan nilai tambah, pemasaran dan daya saing produk, penguatan dampak ekonomi, social, dan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

Tahapan V, difokuskan pada penyelesaian Penyelesaian seluruh target, sasaran, dan indikator kinerja Renstra, Konsolidasi dan penguatan hasil pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Penguatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Evaluasi akhir pelaksanaan Renstra. Secara rinci rencana implementasi tahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Tahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP V (2030)
<p>Penguatan fondasi perencanaan sektor Kelautan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan penyelarasan dokumen perencanaan sektor kelautan dan perikanan 2. Pemetaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan berbasis data 3. Penguatan sistem data dan informasi sektoral- Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pelaku usaha 4. Penyiapan regulasi, kelembagaan, dan sistem pendukung 	<p>Percepatan implementasi perencanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program prioritas secara intensif pada seluruh subsektor 2. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana produksi 3. Fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan usaha 4. Penerapan alat tangkap ramah lingkungan dan teknologi budidaya 5. Pendampingan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha 	<p>Pemantapan implementasi pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan melalui pembangunan sapsras dan peningkatan SDM pelaku usaha KP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan efisiensi pelaksanaan program 2. Integrasi program hulu-hilir kelautan dan perikanan 3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital 4. Penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi 5. Penguatan keberlanjutan program dan kegiatan 	<p>Pemerataan hasil dan peningkatan dampak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Hasil dan Peningkatan Dampak 2. Perluasan jangkauan program ke seluruh wilayah dan kelompok sasaran 3. Pemerataan pemanfaatan lahan budidaya dan kawasan pesisir 4. Peningkatan nilai tambah, pemasaran, dan daya saing produk 5. Penguatan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan 6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan 	<p>Penyelesaian target pembangunan, transisi, dan keberlanjutan pembangunan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian seluruh target, sasaran, dan indikator kinerja Renstra 2. Konsolidasi dan penguatan hasil pembangunan sektor kelautan dan perikanan 3. Penguatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Evaluasi akhir pelaksanaan Renstra 5. Penyiapan arah kebijakan dan program periode berikutnya

Arah kebijakan adalah panduan strategis atau garis besar keputusan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. arah kebijakan berfungsi sebagai **pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan**, agar semua langkah yang diambil tetap selaras dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus.

Arah kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025- 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1.	<p>Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan melalui peningkatan produksi perikanan 2. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>Bantuan penyediaan sarana dan prasarana sektor unggulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan melalui pembinaan, pengawasan 2. Pengembangan fasilitas sapsras penangkapan ikan, peremajaan alat tangkap, penambahan armada tangkap 3. Standarrisasi kapal dan alat tangkap serta kerekayasaan dan penerapan inovasi teknologi kapal dan alat penangkap ikan yang efisien dan ramah lingkungan, 4. Mendorong pemulihan stok habitat SDI dengan penyediaan rumah ikan buatan, transplantasi karang 5. Mendorong peningkatan sapsras budidaya, pengolahan serta pemasaran yang memadai 	
		<p>Penguatan kelembagaan perikanan : Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan/bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha perikanan (Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar) 2. Pendampingan penyuluh yang intensif dan pembinaan yang berkesinambungan 	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			3. Melakukan advokasi dan kerjasama semua lintas sektoral dalam memprovoasi konsumsi ikan di masyarakat	
		Fasilitas pengembangan koperasi merah putih berbasis potensi lokal	1 Mendorong perencanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih 2 Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana PPI dan TPI 3 Pengembangan kawasan perikanan terpadu yang mengintegrasikan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. 4 Penguatan keterpaduan antar-subsektor perikanan serta dukungan sarana dan prasarana dari hulu hingga hilir. 5 Penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha dalam pengelolaan kawasan perikanan terpadu	
		Penguatan kualitas dan diverifikasi produk UMKM dan IKM serta kelembagaan pelaku usaha melalui pendampingan	1. Pendampingan penyuluhan yang intensif dan pembinaan yang berkesinambungan 2. Pengembangan sistem pemasaran produk perikanan yang efektif,	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			<p>inovatif, dan berbasis pasar.</p> <p>3. Peningkatan mutu, standar kualitas, dan daya saing produk perikanan.</p> <p>4. Penguatan nilai tambah produk perikanan melalui pengolahan dan promosi yang berkelanjutan</p>	
		Pengembangan agrobisnis dan agrowisata	<p>1 Mendorong perlindungan ekosistem mangrove melalui konservasi, rehabilitasi</p> <p>2 Peningkatan peran masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian mangrove melalui pembinaan dan pengawasan</p>	
		Peningkatan produksi perikanan	<p>1. Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap</p> <p>2. Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya</p> <p>3. Mendorong peningkatan produksi produk olahan KP</p>	
		Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	<p>1 Demonstrasi dan kampanye GEMARIKAN</p> <p>2 Mendorong pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan sarana produksi alternatif seperti pemanfaatan pakan alami, budidaya pakan alami, serta</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			menerapkan inovasi dalam menekan biaya produksi	
		Asuransi bagi seluruh nelayan	Mengusulkan berkas dan permohonan asuransi nelayan serta seluruh pelaku usaha perikanan	

Arah kebijakan yang uraikan di atas adalah arah kebijakan Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Dompu mengacu pada tugas dan fungsi yang dikaitkkan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dompu Tahun 2025-2045 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan	Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Mendorong penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi dan pendampingan berkelanjutan bagi SDM sektor Perikanan
		Meningkatnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan sapsras budidaya serta pengolahan dan pemasaran yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan melalui pembinaan, pengawasan 2 Pengembangan fasilitas sapsras penangkapan ikan, peremajaan alat tangkap, penambahan armada tangkap 3 Standarrisasi kapal dan alat tangkap serta kerekayasaan dan penerapan inovasi teknologi kapal dan alat penangkap ikan yang efisien dan ramah lingkungan, 4 Mendorong pemulihan stok habitat SDI dengan penyediaan rumah ikan buatan, transplantasi karang 5 Mendorong peningkatan sapsras budidaya, pengolahan serta pemasaran yang memadai 6 Mendorong meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			budidaya serta produksi produk olahan kelautan dan perikanan
		Memperkuat pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mendorong perlindungan ekosistem mangrove melalui konservasi, rehabilitasi 2 Peningkatan peran masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian mangrove melalui pembinaan dan pengawasan
		Meningkatkan fasilitas akses pembiayaan usaha kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mendorong kemudahan akses pembiayaan atau kredit pinjam melalui kemitraan dengan lembaga keuangan dan penguatan kelembagaan usaha 2 Mendorong kemudahan syarat administrasi dalam pengurusan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan
		Meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan sarana produksi alternatif untuk mengurangi dampak flutuasi harga	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mendorong pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan sarana produksi alternatif seperti pemanfaatan pakan alami, budidaya pakan alami, serta menerapkan inovasi dalam menekan biaya produksi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan pengembangan dan menata Kawasan perikanan berbasis potensi, daya dukung dan keberlanjutan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 2 Pengembangan dan penataan kawasan perikanan unggulan berdasarkan potensi sumber daya perikanan dan daya dukung lingkungan 3 Penerapan pengelolaan kawasan perikanan yang berkelanjutan melalui perlindungan ekosistem dan pengendalian pemanfaatan sumber daya 4 Penguatan dukungan sarana prasarana serta tata kelola kawasan perikanan yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
		Mewujudkan Kawasan pengelolaan perikanan terpadu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mendorong perencanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih 2 Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana PPI dan TPI 3 Pengembangan kawasan perikanan terpadu yang mengintegrasikan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. 4 Penguatan keterpaduan antar-subsektor perikanan serta dukungan sarana dan prasarana dari hulu

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>hingga hilir.</p> <p>5 Penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha dalam pengelolaan kawasan perikanan terpadu.</p>
	<p>Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan</p>	<p>Mengembangkan sistem pemasaran, peningkatan kualitas produk dan penguatan nilai tambah melalui pengolahan serta promo</p>	<p>1 Melaksanakan pelatihan/bimtek dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi pelaku usaha perikanan (nalayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar)</p> <p>2 Pendampingan penyuluh yang intensif dan pembinaan yang berkesinambungan</p> <p>3 Demonstrasi dan kampanye GEMARIKAN</p> <p>4 Melakukan advokasi dan kerjasama semua lintas sektoral dalam memprovoasi konsumsi ikan di masyarakat</p> <p>5 Pengembangan sistem pemasaran produk perikanan yang efektif, inovatif, dan berbasis pasar.</p> <p>6 Peningkatan mutu, standar kualitas, dan daya saing produk perikanan.</p> <p>7 Penguatan nilai tambah produk perikanan melalui pengolahan dan promosi yang berkelanjutan</p>
		<p>Meningkatkan jumlah asuransi nelayan serta pelaku usaha perikanan</p>	<p>Mendorong peningkatan jumlah asuransi pelaku usaha perikanan (Nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar)</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penguatan tata kelola keuangan OPD yang transparan, akuntabel, dan taat regulasi. 2 Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi kinerja OPD berbasis hasil. 3 Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM OPD dalam pengelolaan keuangan dan manajemen kinerja

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa setiap Kepala Daerah diinstruksikan untuk mengarahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyusun Renstra secara simultan, terintegrasi dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri di atas maka penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029 dilakukan tidak hanya untuk menjamin kesinambungan arah dan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga untuk memperkuat konsistensi perencanaan program dan penganggaran yang berorientasi pada hasil selama 5 (lima) tahun kedepan.

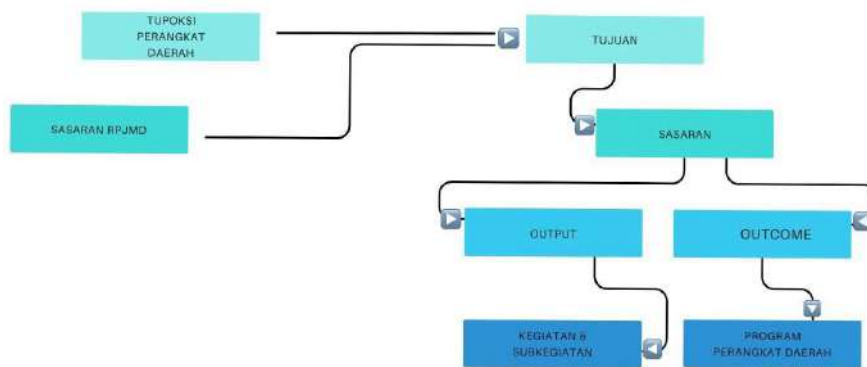
Renstra yang disusun ini akan menjadi pedoman utama dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran, dengan dukungan alokasi pendanaan yang efektif, efisien dan berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus memastikan bahwa setiap program yang dirancang selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah dan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pencapaian target-target kinerja pembangunan khususnya dalam sektor Kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan.

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur dan berbasis kinerja. Proses ini didasarkan pada hasil penjenjangan kinerja yang mengidentifikasi keterkaitan logis antara tujuan strategis daerah dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu, penyusunan Program juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria (NSPK) yang berlaku sehingga seluruh Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tetap berada dalam koridor regulative Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu memastikan bahwa setiap rancangan Program selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi acuan utama dalam menyusun program prioritas, yang kemudian dijabarkan secara berjenjang ke dalam tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Dompu Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan telah merumuskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan di dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029.

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam upaya untuk mencapai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030, dimana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan merupakan bagian dari upaya menjaga

kesinambungan perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja hingga Tahun 2030. Adapun daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2030 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, dan Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
- Dinas Kelautan dan Perikanan								
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan 	Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan			Jumlah Total Produksi Perikanan (Ton)			
					Persentase Produksi Perikanan Tangkap Terhadap Target Daerah (%)			
						Persentase Produksi Perikanan Budidaya Terhadap Target Daerah (%)		
			Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat			Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Cakupan usaha mikro dan kecil bidang perikanan yang tersertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Cakupan penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan			Persentase Peningkatan Volume Produksi Olahan Perikanan (%)		
					Nilai Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/KAP/TH)		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Cakupan peningkatan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan	

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				pemberdayaan masyarakat pesisir	Kapasitasnya (Orang)	Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya terhadap target daerah	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)		
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Perangkat Daerah			Predikat SAKIP OPD (Predikat)		
			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah		Predikat SAKIP OPD (Predikat)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Predikat SAKIP OPD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Data)		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.25.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase Pengadministrasian Keuangan OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Persentase Persentase Pengadministrasian Umum OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Disediakan (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase pengadaan BMD dalam Menunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

1	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Dompus Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.096.311.547,00		9.131.256.220,00		9.268.225.063,00		9.407.248.400,00		9.548.357.200,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.396.311.547,00		5.578.756.220,00		5.662.437.563,00		5.747.374.100,00		5.833.584.700,00	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Predikat SAKIP OPD (Predikat)	A	A	5.396.311.547,00	A	5.578.756.220,00	A	5.662.437.563,00	A	5.747.374.100,00	A	5.833.584.700,00	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.997.368,00		45.447.341,00		45.901.814,00		46.360.832,00		46.824.440,00	
Predikat SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	44.997.368,00	2	45.447.341,00	2	45.901.814,00	2	46.360.832,00	2	46.824.440,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	134	134		134		134		134		134		
3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24.997.368,00		25.447.341,00		25.901.814,00		26.360.832,00		26.824.440,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	24.997.368,00	2	25.447.341,00	2	25.901.814,00	2	26.360.832,00	2	26.824.440,00	
3.25.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.25.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	134	134	10.000.000,00	134	10.000.000,00	134	10.000.000,00	134	10.000.000,00	134	10.000.000,00	
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.380.950.519,00		4.489.000.805,00		4.561.784.600,00		4.635.714.614,00		4.710.808.626,00	
Persentase Pengadministrasian Keuangan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	39	4.380.950.519,00	39	4.489.000.805,00	39	4.561.784.600,00	39	4.635.714.614,00	39	4.710.808.626,00	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.300.413.119,00		4.407.658.031,00		4.479.628.399,00		4.552.736.851,00		4.627.001.086,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	39	4.300.413.119,00	39	4.407.658.031,00	39	4.479.628.399,00	39	4.552.736.851,00	39	4.627.001.086,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
3.25.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				80.537.400,00		81.342.774,00		82.156.201,00		82.977.763,00		83.807.540,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	80.537.400,00	12	81.342.774,00	12	82.156.201,00	12	82.977.763,00	12	83.807.540,00	
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				402.425.754,00		406.450.009,00		410.514.506,00		414.619.647,00		418.765.840,00	
Persentase Persentase Pengadministrasian Umum OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	402.425.754,00	20	406.450.009,00	20	410.514.506,00	20	414.619.647,00	20	418.765.840,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	10		10		10		10		10		
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.878.910,00		8.967.699,00		9.057.375,00		9.147.948,00		9.239.427,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	8.878.910,00	20	8.967.699,00	20	9.057.375,00	20	9.147.948,00	20	9.239.427,00	
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.445.830,00		16.610.288,00		16.776.390,00		16.944.153,00		17.113.594,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	16.445.830,00	10	16.610.288,00	10	16.776.390,00	10	16.944.153,00	10	17.113.594,00	
3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.597.881,00		21.813.859,00		22.031.997,00		22.252.316,00		22.474.839,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	10	21.597.881,00	10	21.813.859,00	10	22.031.997,00	10	22.252.316,00	10	22.474.839,00	
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				74.745.050,00		75.492.500,00		76.247.425,00		77.009.899,00		77.779.997,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	74.745.050,00	12	75.492.500,00	12	76.247.425,00	12	77.009.899,00	12	77.779.997,00	
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				76.534.568,00		77.299.913,00		78.072.912,00		78.853.641,00		79.642.177,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	76.534.568,00	12	77.299.913,00	12	78.072.912,00	12	78.853.641,00	12	79.642.177,00	
3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				110.090.000,00		111.190.900,00		112.302.809,00		113.425.837,00		114.560.095,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	110.090.000,00	12	111.190.900,00	12	112.302.809,00	12	113.425.837,00	12	114.560.095,00	
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				94.133.515,00		95.074.850,00		96.025.598,00		96.985.853,00		97.955.711,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	94.133.515,00	12	95.074.850,00	12	96.025.598,00	12	96.985.853,00	12	97.955.711,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.561.500,00		106.217.896,00		107.280.074,00		108.352.874,00		109.436.402,00	
Persentase pengadaan BMD dalam Menunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	30	41.561.500,00	30	106.217.896,00	30	107.280.074,00	30	108.352.874,00	30	109.436.402,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	15		20		20		20		20		
3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				17.321.500,00		49.615.105,00		50.111.256,00		50.612.368,00		51.118.491,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	30	17.321.500,00	30	49.615.105,00	30	50.111.256,00	30	50.612.368,00	30	51.118.491,00	
3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.240.000,00		56.602.791,00		57.168.818,00		57.740.506,00		58.317.911,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	15	24.240.000,00	20	56.602.791,00	20	57.168.818,00	20	57.740.506,00	20	58.317.911,00	
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302.942.256,00		305.971.678,00		309.031.394,00		312.121.707,00		315.242.923,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	302.942.256,00	12	305.971.678,00	12	309.031.394,00	12	312.121.707,00	12	315.242.923,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.420.000,00		42.844.200,00		43.272.642,00		43.705.368,00		44.142.421,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	42.420.000,00	12	42.844.200,00	12	43.272.642,00	12	43.705.368,00	12	44.142.421,00	
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				260.522.256,00		263.127.478,00		265.758.752,00		268.416.339,00		271.100.502,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	260.522.256,00	12	263.127.478,00	12	265.758.752,00	12	268.416.339,00	12	271.100.502,00	
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223.434.150,00		225.668.491,00		227.925.175,00		230.204.426,00		232.506.469,00	
Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	223.434.150,00	25	225.668.491,00	25	227.925.175,00	25	230.204.426,00	25	232.506.469,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10		
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				130.709.150,00		132.016.241,00		133.336.403,00		134.669.767,00		136.016.464,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	130.709.150,00	25	132.016.241,00	25	133.336.403,00	25	134.669.767,00	25	136.016.464,00	
3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.545.000,00		4.590.450,00		4.636.354,00		4.682.717,00		4.729.544,00	
Tertersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	4.545.000,00	10	4.590.450,00	10	4.636.354,00	10	4.682.717,00	10	4.729.544,00	
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.180.000,00		89.061.800,00		89.952.418,00		90.851.942,00		91.760.461,00	
Tertersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1	88.180.000,00	1	89.061.800,00	1	89.952.418,00	1	90.851.942,00	1	91.760.461,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14	
Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				800.000.000,00		1.624.000.000,00		1.648.360.000,00		1.673.085.400,00		1.698.181.700,00		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	49.302,77	50.049	800.000.000,00	51.050	1.624.000.000,00	52.051	1.648.360.000,00	53.052	1.673.085.400,00	54.053	1.698.181.700,00		
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				106.051.040,00		212.102.080,00		222.343.100,00		228.687.432,00		235.157.029,00		
Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	12	12	106.051.040,00	12	212.102.080,00	12	222.343.100,00	12	228.687.432,00	12	235.157.029,00		
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				106.051.040,00		212.102.080,00		222.343.100,00		228.687.432,00		235.157.029,00		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	12	12	106.051.040,00	12	212.102.080,00	12	222.343.100,00	12	228.687.432,00	12	235.157.029,00		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				693.948.960,00		1.411.897.920,00		1.426.016.900,00		1.444.397.968,00		1.463.024.671,00		
Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	130	150	693.948.960,00	150	1.411.897.920,00	150	1.426.016.900,00	150	1.444.397.968,00	150	1.463.024.671,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	379	500		500		500		500		500			
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				64.998.960,00		153.997.920,00		155.537.900,00		161.214.178,00		167.009.044,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	130	150	64.998.960,00	150	153.997.920,00	150	155.537.900,00	150	161.214.178,00	150	167.009.044,00	
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				628.950.000,00		1.257.900.000,00		1.270.479.000,00		1.283.183.790,00		1.296.015.627,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	379	500	628.950.000,00	500	1.257.900.000,00	500	1.270.479.000,00	500	1.283.183.790,00	500	1.296.015.627,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				700.000.000,00		1.421.000.000,00		1.442.315.000,00		1.463.949.700,00		1.485.909.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	11.751,7	12.930,12	700.000.000,00	14.147,12	1.421.000.000,00	15.532,11	1.442.315.000,00	17.110,67	1.463.949.700,00	18.912,25	1.485.909.000,00	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				34.666.000,00		79.832.000,00		83.823.600,00		88.014.780,00		92.415.520,00	
Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	190	260	34.666.000,00	270	79.832.000,00	280	83.823.600,00	290	88.014.780,00	300	92.415.520,00	
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				34.666.000,00		79.832.000,00		83.823.600,00		88.014.780,00		92.415.520,00	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	190	260	34.666.000,00	270	79.832.000,00	280	83.823.600,00	290	88.014.780,00	300	92.415.520,00	
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				665.334.000,00		1.341.168.000,00		1.358.491.400,00		1.375.934.920,00		1.393.493.480,00	
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya terhadap target daerah	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	43	42	665.334.000,00	44	1.341.168.000,00	46	1.358.491.400,00	48	1.375.934.920,00	50	1.393.493.480,00	
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	8	12		14		16		18		20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				625.760.000,00		1.251.520.000,00		1.264.035.200,00		1.276.675.552,00		1.289.442.307,00	
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	43	42	625.760.000,00	44	1.251.520.000,00	46	1.264.035.200,00	48	1.276.675.552,00	50	1.289.442.307,00	
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				39.574.000,00		89.648.000,00		94.456.200,00		99.259.368,00		104.051.173,00	
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	8	12	39.574.000,00	14	89.648.000,00	16	94.456.200,00	18	99.259.368,00	20	104.051.173,00	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				200.000.000,00		507.500.000,00		515.112.500,00		522.839.200,00		530.681.800,00	
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	35	36	200.000.000,00	36,5	507.500.000,00	37	515.112.500,00	37,5	522.839.200,00	38	530.681.800,00	
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				30.825.200,00		105.400.400,00		108.991.905,00		112.657.400,00		116.398.183,00	
Cakupan usaha mikro dan kecil bidang perikanan yang tersertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	20	26	30.825.200,00	27	105.400.400,00	28	108.991.905,00	29	112.657.400,00	30	116.398.183,00	

RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DOMPU 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				30.825.200,00		105.400.400,00		108.991.905,00		112.657.400,00		116.398.183,00	
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	20	26	30.825.200,00	27	105.400.400,00	28	108.991.905,00	29	112.657.400,00	30	116.398.183,00	
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				169.174.800,00		402.099.600,00		406.120.595,00		410.181.800,00		414.283.617,00	
Cakupan penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3	2	169.174.800,00	3	402.099.600,00	3	406.120.595,00	3	410.181.800,00	4	414.283.617,00	
	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	50,81	55,68		56,57		57,47		58,39		60		
				81.750.000,00		204.333.333,00		206.376.666,00		208.440.432,00		210.524.836,00	
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	50,81	55,68	81.750.000,00	56,57	204.333.333,00	57,47	206.376.666,00	58,39	208.440.432,00	60	210.524.836,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				87.424.800,00		197.766.267,00		199.743.929,00		201.741.368,00		203.758.781,00	
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3	2	87.424.800,00	3	197.766.267,00	3	199.743.929,00	3	201.741.368,00	4	203.758.781,00	

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan				
1.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
2.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

x

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu adalah ketersediaan Indikator Kinerja yang berguna untuk mengukur Capaian Target Kinerja Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam Evaluasi Kinerja Program-Program Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Dokumen Perencanaan.

Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Target Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompuyang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini akan diukur dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam Pelaporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu selama 5 (Lima) Tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 sebagai target indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025- 2029 sebagai target indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan. IKU dan IKK dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4. 4a Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Ton)	Ton	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun N	61.054,47	61.408,00	62.979,12	65.197,12	67.583,11	70.162,67	72.965,25	
1	Persentase Produksi Perikanan Tangkap Terhadap Target Daerah (%)	%	Produksi Tahun N dibagi Total Produksi Akhir RPJMD dikali 100%	20,55	15,99	16,16	16,48	16,80	17,12	17,45	
2	Persentase Produksi Perikanan Budidaya Terhadap Target Daerah (%)	%	Produksi Tahun N dibagi Total Produksi Akhir RPJMD dikali 100%	18,09	13,11	14,29	15,63	17,16	18,91	20,90	
3	Persentase Peningkatan Volume Produksi Olahan Perikanan (%)	%	Produksi Tahun N dibagi Total Produksi Akhir RPJMD dikali 100%	16,70	16,01	16,27	16,53	16,79	17,06	17,33	
4	Nilai Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/KAP/TH)	(Kg/KAP/TH)	Nilai Konsumsi ikan Tahun -N	35	35	36	36,5	37	37,5	38	
5	Predikat SAKIP OPD (Predikat)	Predikat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	

Tabel 4. 4b Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Ton)	Ton	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun N	61.054,47	61.408,00	62.979,12	65.197,12	67.583,11	70.162,67	72.965,25	400.295,27
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Produksi Tahun N	20,55	49.548	50.049	51.050	52.051	53.052	54.053	309.803
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Produksi Tahun N	18,09	11.860	12,930,12	14.147,12	15.532,11	17.110,67	18.912,25	90.492,27
3	Volume Produksi Olahan Perikanan	Ton	Produksi Tahun N	16,70	23.800	24.181	24.568	24.961	25.360	25.766	148.636
4	Nilai Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/KAP/TH)	(Kg/KAP/TH)	Nilai Konsumsi ikan Tahun - N	35	35	36	36,5	37	37,5	38	38
5	Predikat SAKIP OPD (Predikat)	Predikat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	A

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
A	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun N	61.054,47	61.408,00	62.979,12	65.197,12	67.583,11	70.162,67	72.965,25	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Produksi Tahun N	49.302,77	49.549,00	50.049	51.050	52.051	53.052	54.053	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Produksi Tahun N	11.751,70	11860	12.930,12	14.147,12	15,532,11	17.110,67	18.912,25	
B	Nilai Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/KAP/TH)	(Kg/KAP/TH)	Nilai Konsumsi ikan Tahun - N	35	35	36	36,5	37	37,5	38	

BAB V

PENUTUP



**DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2025**

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dalam merencanakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta pendanaannya dalam periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Selain itu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu juga memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan serta komitmen semua unsur. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Renstra yaitu evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari Renstra ini yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, serta melakukan sosialisasi dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu kepada seluruh pegawai, mitra, serta pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Dompu.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi pedoman atau panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan.

Disamping itu, dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu untuk menjaga integritas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan, serta untuk terus mampu menyikapi dinamika maupun isu-isu strategis yang berkembang di tingkat daerah, regional, nasional, maupun global.

5.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja (Renja) setelah Rencana Strategis (Renstra) berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Dompus, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Tahun 2025

Penyusunan Renja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026 karena dokumen Renstra Tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Dikarenakan Renja Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam Renstra Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Perubahan Renja Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan DPA Tahun Anggaran 2025.

2. Renja Tahun 2026

Penyusunan Renja Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029.

3. Renja Tahun 2030

Penyusunan Renja Tahun 2030 disusun tetap dengan berpedoman pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029 ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 ditetapkan. Rencana Strategis Bappaeda dan Litbang Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029 ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus setiap tahunnya. Dalam rangka memperjelas pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab serta diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu berkewajiban untuk menyusun Renja yang memuat Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta pendanaannya esuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029. Bagi Bidang yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perkada Renstra ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
3. Untuk menjalankan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025–2029, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penjabaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu diawali dengan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.
 - b. Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten serta Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.
 - c. Rancangan Akhir Renja disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan mengacu pada hasil dari Forum Perangkat Daerah.
4. Dokumen Renstra dan Renja merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Dompu. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan Kepala Daerah.
5. Dokumen Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

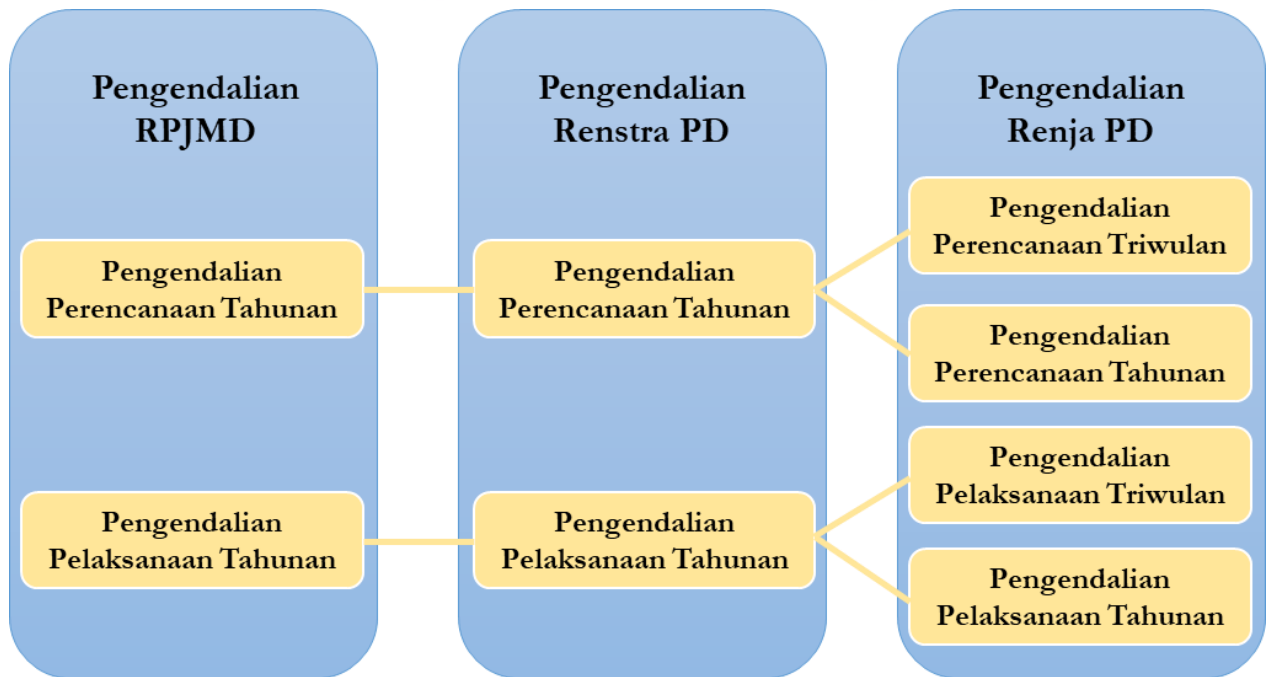
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Resntra dengan Renja Perangkat Daerah.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029, perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke 2 (dua) sampai tahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen Renstra ini, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang ada, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.

Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun pelaku non pemerintah.

Sebagai alat ukur ketercapaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemilihan indikator kinerja menerapkan kriteria SMART; *Spesific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant* dan *Time-Bound* sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam perencanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat daerah, dan seluruh indikator Renstra Perangkat Daerah harus menjadi bagian dari Renja Perangkat Daerah.



Gambar 5. 1 Keterkaitan Pengendalian Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan dalam RPJMD, RENSTRA, dan RENJA

Pengendalian pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus dilaksanakan dengan melakukan:

1. Monitoring dan evaluasi tahunan;
2. *Mid-term* reuiu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029 pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra;
3. Evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2025-2029.

Secara inklusif, dilakukan juga proses pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala untuk program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus. Hal ini penting untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam capaian kinerja program unggulan yang berkontribusi langsung pada capaian target indikator kinerja visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dompus.

Dokumen hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi ini menjadi dasar untuk mereviu strategi, arah kebijakan, desain program dan kegiatan, target sasaran dan capaian indikator kinerja pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus. Hal ini sangat penting untuk mendukung visi

Kabupaten Dompu Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Dompu yang Maju, Sejahtera, Religius, Berkeadilan dan Berbudaya”.



Dompu, Desember 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dompu,

Amiruddin, S.Hut

Rebina TK. II (IV/b)

NIP. 19711130 199803 1 009